

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERGESERAN
PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK**

(Studi Kasus Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir Oku Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syari'ah

Oleh

Senjha Haryanto

NPM: 1621010194

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERGESERAN
PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK**
(Studi Kasus Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan)

Skripsi

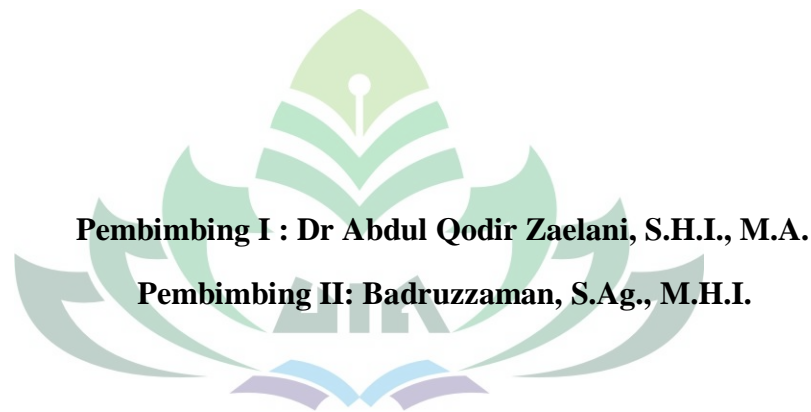
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Senjha Haryanto

NPM : 1621010194

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah



Pembimbing I : Dr Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Pembimbing II: Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Hukum Waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam. Untuk anak laki-laki mendapat bagian $\frac{2}{1}$ sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, apakah penyebab terjadinya pergeseran waris adat Semende Lembak, selanjutnya bagaimana analisis hukum Islam terhadap pergeseran waris adat Semende Lembak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya pergeseran waris adat Semende Lembak, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pergeseran waris adat Semende Lembak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *Field Research* yang bersifat analisis deskriptif, metode pengumpulan datanya yaitu interview, observasi dan wawancara. Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini ditemukan data di lapangan bahwa pembagian waris di desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan tidak menggunakan hukum waris Islam tidak juga menggunakan hukum waris adat Semende Lembak melainkan harta waris dibagikan secara sama rata agar tidak adanya perselisihan diantara ahli waris supaya mendapatkan pembagian yang adil yang dilakukan dengan musyawarah mufakat diantara keluarga. Analisis hukum Islam terhadap pergeseran waris adat Semende Lembak diantara syarat pembagian waris ialah adanya keadilan, karena ketidakadilan orangtua akan menjadi sebab kebencian diantara anak. Tapi disini lain jangan sekali kali seorang anak berprasangka buruk dan berkata orangtuaku tidak adil. Jika pada dasarnya dalam pembagian waris tidak menginginkan perpecahan dalam keluarganya karena pembagian waris yang tidak adil, hal itu senada dengan hukum Islam yang sangat menekankan adanya keadilan dari segala aspek dalam kehidupan, karena itu jika mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan Allah SWT.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Faks. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK PERGESERAN PELAKSANAAN
WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK (Studi
Kasus Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau
Ilir Oku Selatan)**

Nama : **Senjha Haryanto**
NPM : **1621010194**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Oodir Zaelani, M.A.
NIP. 1982062620090110115

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Faks. (0721) 703289

PENGESAHAN

Judul Skripsi dengan judul: **"ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERGESERAN PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK (Studi Kasus Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan)"** disusun oleh, Senjha Haryanto, NPM 1621010194, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria'h, UIN Raden Intan pada hari/Tanggal: Kamis, 18 Maret om 2021

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat S.Ag., M.H.I

(.....)

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. M. Yasir, M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

(.....)

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syaria'h UIN Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khoiruddin, M.H

NIP: 196210221993031002

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿١١﴾

”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Yaitu: bahagian seseorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

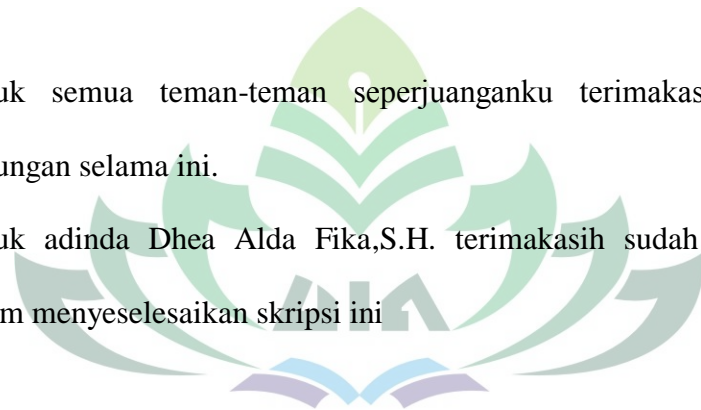
(Q.S An-Nisa:11)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang.

1. Bapak tercinta Supriono dan Ibunda Sri Suryani terimakasih atas kasih sayang do'a serta dukungan yang diberikan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. Untuk kedua adik ku Agus Sumantri dan Nisa Fathul Jana terimakasih untuk do'a dukungan dan semangat.
3. Untuk Nenek Kakek saudara sepupu serta keluarga besar ku terimakasih atas semua do'a dukungan dan semangat sehingga aku bisa menyelesaikan studi ini.
4. Untuk semua teman-teman seperjuanganku terimakasih atas do'a dan dukungan selama ini.
5. Untuk adinda Dhea Alda Fika,S.H. terimakasih sudah banyak menemani dalam menyelesaikan skripsi ini

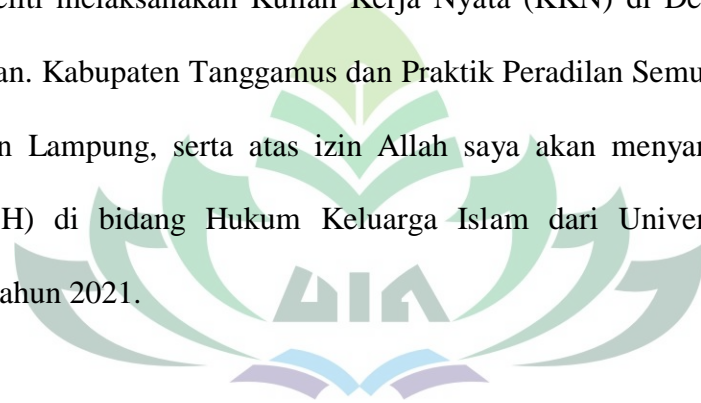


RIWAYAT HIDUP

Senjha Haryanto dilahirkan di Desa Galang Tinggi pada tanggal 06 juni 1997. Putra pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Hartawan dan Ibu Sri Suryani yang telah membesarkan, mendidik sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti pertama kali adalah SD 01 Galang Tinggi kemudian tahun 2010 saya melanjutkan SMPN Talang Kelapa Palembang selanjutnya saya melanjutkan SMA Utama 2 Bandar Lampung pada tahun 2013. Berikutnya pada 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung tahun ajaran 2016/2017.

Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Talang Keluarga Air Naningan. Kabupaten Tanggamus dan Praktik Peradilan Semu (PPS) Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta atas izin Allah saya akan menyandang gelar sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Negeri Lampung Tahun 2021.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pergeseran Pelaksanaan Waris Adat Semende Lembak (Studi Kasus Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan). Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.

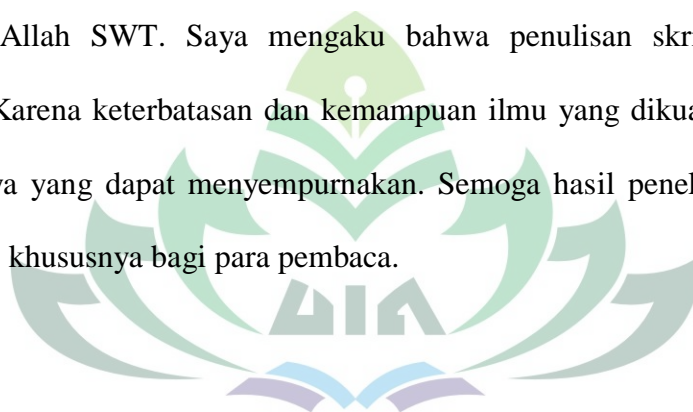
Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu melanjutkan dakwah beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat tugas serta persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar (SH). Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak-pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Rohmat, S,Ag. M.H Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
3. Pembimbing I Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A yang sudah sabar serta banyak membantu meberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing II Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I yang sudah sabar membimbingku dengan sabar serta mengkoreksi skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah terutama jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan setiap waktu, setiap langkah dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adikku yang memberikan semangat dan mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku khusus nya Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang selalu member semangat serta dukungan dalam meraih gelar S.H dikondisi Covid-19 ini.

Semoga kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah SWT. Saya mengaku bahwa penulisan skripsi jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca.



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Fokus Penelitian | 8 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian | 9 |
| G. Signifikansi Penelitian | 9 |
| H. Metode Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Pengertian Waris Islam | |
| 1. Pengertian waris Dalam Islam | |
| 2. Syarat-Syarat Waris Islam | |
| 3. Golongan Ahli Waris | |
| 4. Sebab-Sebab Waris Islam | |
| 5. Ketentuan Bagian Ahli Waris Islam | |
| 6. Asas-asas Kewarisan Islam | |
| 7. Kewajiban Ahli Waris | |
| B. Pengertian Waris Adat | |
| 1. Pengertian Waris Adat | |
| 2. Pembagian Waris Adat Semende | |
| 3. Syarat-Syarat Waris Adat | |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa.....
- B. Pelaksanaan Waris Adat Semende Lembak di Desa
Galang Tinggi, Kabupaten Oku Selatan, Sumatra Selatan.....
- C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Praktik
Pergeseran Pelaksanaan Waris Adat Semende Lembak.....

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Apakah Penyebab Terjadinya Pergeseran Waris
Adat Semende Lembak.....
- B. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap
Pergeseran Pelaksanaan Waris Adat Semende Lembak.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Konsultasi

Lampiran 2 Surat Izin Riset

Lampiran 3 Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Turnitin



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi untuk menghindari kesalah pahaman tentang penelitian ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti dari judul yang akan dibahas. Judul penelitian yang dibahas ini adalah: **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERGESERAN PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK.** Adapun istilah-istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-akibat, duduk perkaranya).¹

2. Hukum Islam

Adalah kumpulan peraturan dalam ajaran Islam yang menyangkut ketentuan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat.²

Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia hukum Islam adalah ketentuan hukum yang temukan langsung oleh Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan- penjelasan Nabi Muhamad SAW yang kini dapat kita baca dalam kitab-kitab hadist.

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi kedua, h. 58.

² Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2009), h. 10.

3. Praktik Pelaksanaan

Praktik adalah perbuatan menerapkan teori keyakinan dan sebagainya, pelaksanaan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, pelaksanaan bisa diartikan penerapan.³

4. Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.⁴

5. Waris Islam

Hukum waris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang.⁵

6. Waris Adat

Waris adat memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya.⁶

³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi kedua, h. 1098.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

⁵ Mawardi Muzamil, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1981), h. 16.

⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), hal.

7. Semende

Semende atau Semendo adalah suatu suku yang berasal dari Pulau Sumatra. Semende termasuk bagian dari kelompok Pasemah, termasuk Lematang, Lintang, dan Lembak. Secara geografis suku Semende dibagi menjadi dua kelompok yaitu Semende Darat di Kabupaten Pulau Pangung dan Muara Enim. Sedangkan Semende Lembak bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam judul proposal skripsi ini adalah menganalisis penyebab pergeseran waris adat Semende Lembak di Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul Tinjauan Hukum Islam tentang praktik pelaksanaan waris Adat Semende Lembak adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Sistem pembagian waris pada adat semende yakni kewarisan dengan sistem Tunggu Tubang, harta hanya diwariskan anak Tunngu Tubang dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak bisa diperjual belikan, hanya berhak mengelola dan mengambil manfaatnya saja. Namun pada masyarakat Desa Galang Tinggi sebagai masyarakat adat semende dalam hal pembagian waris telah mengalami pergeseran, yang tadinya jatuh kepada Tunggu Tubang, namun dalam pelaksanaannya para orang tua membagikan warisan kepada seluruh anaknya dengan sama rata, tentu hal tersebut sudah bergeser dari ketentuan adat semende.

- b. Penulisan ini lebih mengarah pada pergeseran pelaksanaan Waris Adat Semende Lembak.

2. Alasan subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam yang meliputi hukum keluarga dimana hukum waris adalah bagian dari kajian perkuliahan.
- b. Judul tersebut belum pernah dibahas sebelum nya, jadi dipandang baik untuk dibahas dalam skripsi ini.

C. Latar Belakang

Di antara yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁷

Warisan disebut juga merupakan harta peninggalan, para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang kepada ahli waris.

Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal bagaimanakah berbagi hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris (Pustaka Setia, 2009)*, h. 13.

akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸Aturan tentang warisan ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11-12.⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِلَّامَةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّامَةِ النِّصْفُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ
 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ
 لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya:Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Pustaka Setia, 2009), h. 16.

⁹ Departemen Agama RI, *Al qur'an Dan Terjemahanya* (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro 2005), Surat An-Nisa ayat:11.

memperoleh separo harta.¹⁰ Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak: jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Di dalam ayat di atas Allah SWT mewasiatkan atau memerintahkan mengenai anak-anak mu dengan apa yang akan disebutkan ini yaitu sebagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan diantara mereka.¹¹ Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula.

Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW, melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah

¹⁰ *Ibid*, Surat An-Nisa ayat 11.

¹¹ *Tafsir.com*

melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Negara.¹²

Melaksanakan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul nya, jika tidak didasarkan pada keimanan tidak akan ada satu orang pun yang bersedia melaksanakan pembagian waris dengan sistem Islam.

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum kewarisan pun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya. sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik *materil* maupun *nonmaterial* dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹³

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu prinsip *patrilineal*, *matrelenial*, dan *bilateral* atau *parental*.¹⁴ disamping ketiga prinsip keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga prinsip tersebut, misalnya prinsip *patrilineal* beralih-alih (*alternrend*) dan prinsip *unilateral* berganda (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan tersebut sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan. Dalam hal ini hanya akan dibahas sistem kekeluargaan *matrilineal* adat Semendo atau Semende. Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia terbitan LP3ES

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: kencana, 2008), h. 4.

¹³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Praditya Paramita, 2005), h. 10.

¹⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), h. 39.

menyebutkan, suku Semendo atau Semende berasal dari kata Se yang berarti satu dan Mende yang berarti induk atau ibu.¹⁵

Masyarakat suku ini terbagi dua kelompok, yaitu Semende Darat yang bermukim di daerah Kabupaten Muara Enim, dan Semende Lembak yang bermukim di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.¹⁶ Pada dasarnya masyarakat adat Semende Lembak ini sama seperti semende darat menganut tradisi tunggu tubang, sesuai dengan tradisi tunggu tubang anak petempuam paling tua menjadi pemegang harta warisan keluarga. Warisan berupa rumah dan sawah itu tidak boleh dijual. Masyarakat semende lembak ini sama dengan semende darat dalam menjalankan adat istiadat sangatlah *fanatic*, akan tetapi masyarakat Semende lembak sekarang berbeda dengan dulu banyak masyarakat yang meninggalkan tradisi adat contoh nya cara pembagian warisan, dahulu masyarakat Semende lembak ini menggunakan cara pembagian tunggu tubang, akan tetapi tradisi adat seperti ini sudah banyak hilang di Semende Lembak yang bertempat di Oku Selatan khusus nya Kecamatan Mekakau ilir.

Tradisi tunggu tubang ini sebenarnya dahulu masih digunakan oleh kalangan masyarakat di Kecamatan Mekakau Ilir akan tetapi pada saat ini banyak masyarakat yang tidak menggunakan tradisi tunggu tubang, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi bergesernya tradisi ini antara lain karna *moderenisasi*. Oleh karna itu, penelitian ini berfokus terhadap praktik pergeseran pelaksanaan waris adat semende. Dimana sebelumnya adat ini menggunakan tradisi Tunggu Tubang.

¹⁵ Hidayah, Z. *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*.1997), h. 35.

¹⁶ Ibid

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlunya mengkaji “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pergeseran Pelaksanaan Waris Adat Semende Lembak Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan” inilah yang menjadi dasar penulis menulis judul ini untuk mencari faktor penyebab terhadap pegeseran waris di Adat Semende Lembak.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam study dari pengumpulan data peneliti sehingga peneliti akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pergeseran Waris Adat Semende Lembak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Penyebab Terjadinya Pergeseran Waris adat Semende Lembak?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Peregeseran Waris Adat Semende Lembak?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pergeseran waris adat Semende lembak serta relevansnya terhadap pembagian waris.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai pergeseran waris serta relevansinya dalam pembagian waris secara hukum islam dan adat.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman pembagian waris secara hukum waris Islam dan waris adat serta relevansinya dalam menerapkan pembagian waris yang benar.
- c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intang Lampung.

G. Signifikansi Penelitian.

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pergeseran Pelaksanaan Waris Adat Semendo Lembak di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan.
- b. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian agar *validitas* data bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan penelitian pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Namun sebelum memaparkan ketiga metode tersebut, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu tentang sifat dan jenis penelitian.

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-kualitatif*. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁷

Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek atau suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini akan menjelaskan tentang pergeseran waris di Semende Lembak.

3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan, bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Artinya dalam konteks penelitian ini

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 70.

bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Untuk memperoleh data *Primer* penulis melakukan wawancara dengan informan yang mewakili populasi.

b. Data Sekunder

Data *Sekunder* adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber - sumber yang telah ada. Data diperoleh dari perpustakaan, studi dokumentasi. Data sekunder dapat diperoleh melalui catatan-catatan arsi, dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informan pendukung dalam analisis data *Primer*.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu: metode *Observasi*, metode *Interview* dan metode *Dokumentasi*.

a. Metode Observasi

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi *Metode Observasi* adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dari suatu objek yang diselidiki.

b. Metode interview

Dengan teknik ini peneliti menggunakan tanya jawab secara lisan, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara

tersebut dilakukan dengan cara terarah dengan menggunakan pendekatan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.¹⁸

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku- buku dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara benar dan teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi Data (*sistemaziting*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan lain yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *Kualitatif* yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dari dokumentasi.

¹⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2012), h. 46.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 186.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, Hukum kewarisan, dan ilmu faraid. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e, yaitu “harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.”²⁰

Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal 1 huruf d adalah “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Fiqh Mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab Fiqh dan Mawaris. Menurut Prof. T.M. Hasby As-Siddiqi dalam bukunya tentang Hukum Waris, fiqh Mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.²¹

Istilah lain yang digunakan dalam disiplin ilmu ini adalah dengan menggunakan istilah ilmu *faraidh* yang bermakna secara bahasa

²⁰ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1 h. 15

²¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. 1, hal. 18.

adalah kewajiban atau bagaian tertentu. Seorang ilmuan figh bernama Ibnu Rasyd mendefinisikan ilmu faraid adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.²²

Mawaris secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* yang artinya warisan. *Mawaris* disebut juga *faraidh*. *Faraidh* jamak dari kata tunggal *faridah* yang berarti ketentuan bagian ahli waris yang secara jelas diatur dalam Al-Qur'an.²³

Sedangkan dalam KHI, menggunakan kata hukum. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun Hukum Waris menurut KHI pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli Waris dan beberapa bagiannya masing-masing”. Jadi Hukum Waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.²⁴

Dalam literatur Hukum Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya diambil dari bahasa Arab, yaitu Waris, warisan, pusaka dan Hukum kewarisan, yang menggunakan nama Hukum Waris,

²² *Ibid*, h. 15

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet. 2, hal. 1.

²⁴ M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. I, h. 9

memandang kepada orang yang berhak menerima harta Warisan, yaitu yang menjadi subjek dari Hukum ini.

Dalam istilah Hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata Waris dengan dibubuhi kata awalan ke dan ahiran an. Kata Waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut Hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²⁵

2. Dasar Hukum Waris

a) Al-Quran.

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam. Karena itu, kendatipun sumber Hukum kewarisan ada tiga, tetapi kedua hukum sesudah Al-Quran (sunah rasul dan ijtihad) harus tetap mengacu pada Al-Quran. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Quran telah memberikan pedoman yang cukup terinci. Dalam surat Al-Nisa' memuat hampir semua ayat-ayat kewarisan yang keseluruhannya langsung menjelaskan pembagian warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya. Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Nisa [4] : 11, 12, 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ

²⁵ Ibid, h. 15

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁶

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Qomari, 2014), H. 116

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁷

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُرَّ أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
أُنثَىٰ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Qomari, 2014), H. 116

dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁸

b) Al-Hadits.

Hadis Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

“Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata: “Janda saad datang kepada Rasul Allah Saw., bersama dua orang anak perempuannya.” Lalu ia berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan saad yang telah gugur secara syahid bersamamu diperang uhud, paman mereka mengambil harta kekayaan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.” Nabi berkata “Allah Swt akan menetapkan hukum dalam kejadian ini kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan.” Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak perempuan saad, seper delapan untuk istri saad dan selebihnya ambil untukmu.”²⁹

c) Ijtihad.

Ijtihad adalah dasar hukum alternatif sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Berbagai persoalan baru muncul kepermukaan, persoalan itu sendiri belum pernah terjadi pada zaman nabi, sehingga diperlukan usaha para ahli hukum untuk menetapkan hukum persoalan waris.³⁰

²⁸ *Ibid*, h. 118

²⁹ Imam Hafiz Abi 'Is Muhammad bin 'Is at-Tirmidzi, *Jami'u Tirmidzi*, (Riyad: Darussalam Linnasir Wattauzi'i, 279), Hadis No. 2092, hal. 633.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 19

Dalam menetapkan hukum tersebut diperlukan perangkat lain selain al-Quran dan hadis, perangkat itu adalah ijtihad. Ijtihad secara harfiah berarti bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukum persoalan yang baru.

Kehadiran Islam yang dibawa Baginda Nabi Muhammad Saw. Adalah agama yang membawa keadilan, perdamaian dan kebaikan. Kehadirannya membawa nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Asas-asasnya mengandung nilai universal, sempurna, elastis dan dinamis, sistematis dan bersifat *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Kesemua asas-asas ini menjadi pedoman bagi umat Islam dimanapun berada.

Salah satu yang menarik dalam asas tersebut adalah konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. *Ta'abbudi* yang diartikan sebagai "*ghairu ma'qulatil ma'na*" (harus diikuti seperti apa adanya/*taken for granted*) adalah konsep yang didalamnya mengandung "ajaran Islam yang baku" yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Sementara *ta'aqquli* yang diartikan sebagai "*ma'qulatul ma'na*" (dapat dipikirkan), adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu masa, tempat dan lingkungan. Lebih jelasnya, konsep yang berkaitan dengan *ta'aqquli* adalah setiap hal yang berkaitan dengan bidang mu'amalah (*ahkam al-mu'amalat*),

seperti masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan, dan semua yang berkaitan dengan kepentingan umum.³¹

Dengan demikian, konsep *ta'aqquli* ini hampir berada dalam semua lini dalam Islam. Sehingga, timbul sebuah pertanyaan, mengapa peranan akal dalam Islam menempati posisi yang fundamental?. Hal ini dikarenakan menggunakan akal (*ta'aqquli*) adalah bagian dari pesan yang terkandung dalam al-Qur'an. Akal merupakan tonggak kehidupan manusia dan merupakan dasar dari kelanjutan wujudnya. Karenanya, bila ada sebuah penafsiran yang khususnya berkaitan dengan ibadah, ternyata menonjolkan uraian tentang hikmah pensyariatan ibadah, maka tafsir itu rasional, karena pada dasarnya hikmah sendiri merupakan bahasan atau ilmu yang bersifat pemikiran (*al-'ilm al-nadzar*), atau ia merupakan pembicaraan yang rasional (*al-kalam al-ma'qul*). Dengan kata lain, apabila tafsir tersebut mempunyai kecenderungan (*al-naza'at*) pada upaya-upaya perbaikan masyarakat (*al-ishlah al-mujtama'*), atau juga mengandung kecenderungan pada pembaruan bidang pemikiran keagamaan (*tajdid al-fikr aldini*) maka tafsir itu tergolong rasional.³²

Begitu pentingnya peranan akal dalam memahami pesan teks keagamaan, maka ijtihad dalam konteks perkembangan zaman adalah sebuah keharusan, sebab makna ijtihad yang berarti *badzlul juhdi fistinbatil hukmi* adalah upaya mujtahid dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Dengan demikian, peran ijtihad bukanlah hal yang dianggap sepele dan sederhana, namun menjadi sesuatu yang

³¹ Abdul Qodir Zaelani, "*Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam*" (ASAS Vol. 6, No.1, Januari 2014), h. 47

³² *Ibid*, h. 47

istimewa dalam agama Islam. Hal ini didasarkan bahwa peran ijtihad secara garis besar dapat maknai dalam tiga segi, yaitu: *pertama*, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari *dhahir* nash manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan nash. Cara ini dilakukan setelah memeriksa keadaan '*amm*-kah ia atau *khas*, *muthlaq*-kah atau *muqayyad*, *nasikh*-kah atau *mansukh*, dan hal-hal lain lagi yang bersangkutan dengan lafad. *Kedua*, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi '*illat* bagi hukum nash itu: *illat mansusah* atau *mustanbahah*, '*illat qasirah*, ataukah *muta'addiyah*, dan sebagainya. Cara ini dikenal dengan qiyas. *Ketiga*, ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar. Cara ini dikenal dengan *istislah*, *istishab*, *masalah mursalah*, *sadz zari'ah*, *istihsan*, dan sebagainya.³³

Karena itulah, peran mujtahid dalam setiap masa sangat diperlukan, hal ini didasarkan dari sifat hukum yang bisa berubah dikarenakan perubahan waktu dan tempat. Sebagaimana dalam kaidah, *taghayur al-ahkam bi al-taghayur al-azman wa al-amkinah*. Sehingga kehadiran hukum terbangun dari kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia. Dan syariah seluruhnya bersifat adil, penuh kasih sayang, berorientasi maslahat dan bijak. Karenanya, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih

³³ *Ibid*, h. 48

sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju kecurangan, dan dari kebijakan menuju ke sewenangwenangan, maka bukanlah syariat.³⁴

Pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui deduksi analogis (kias), *istihsân*, *istislâh*, dan *sad al-dhârâ'i*. Dengan berbagai jalan tersebut para mujtahid mencari kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut dinamakan ijma'.

Contoh ijma' dalam persoalan kewarisan misalnya pembagian warisan terhadap waria yang sebelumnya belum ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang membicarakan persoalan tersebut. Demikian juga ijtihad yang dilakukan Zaid bin Thabit dalam soal pembagian warisan pada kasus ahli waris terdiri ibu, bapak, dan salah seorang suami istri sudah mati, dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya.³⁵

3. Prinsip Hukum Kewarisan Islam

- a) Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
- b) Warisan adalah ketentuan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan

³⁴ Ibid, h. 48

³⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 33.

hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani untuk melunasi hutang mayit (pewaris).

- c) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab atau keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lemah. Misalnya ayah, lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
- d) Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semuanya berhak mendapat warisan.
- e) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orangtuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris).

Bagian tertentu dari harta itu adalah ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Quran (QS. Al-Ankabut: 13) adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat *ta'abbudi* itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.³⁶

4. Rukun dan Syarat Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara shalat. Apabila salah satu dari rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu pula dengan perkara waris. Jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris adalah: harta warisan, pewaris, ahli waris.³⁷

a) Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.³⁸ Para ahli fiqh juga biasa menyebut harta waris, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.³⁹

Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab fiqh disebut juga dengan *Tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4.

³⁷ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1, h. 36

³⁸ *Ibid*, h. 36

³⁹ *Ibid*, h. 36

berpendapat bahwa *Tirkah* adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan harta waris adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya Pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta-harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.

b) Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalkannya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris,

⁴⁰ *Ibid*, h. 36

meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.⁴¹

Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan harus miliknya dengan sempurna, dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia.

c) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴² Ahli waris dalam istilah fiqh disebut juga dengan waris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris karena mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.⁴³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi. Adapun tentang pembahasan matinya pewaris mutlak harus dipenuhi, seorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia. Ini berarti bahwa, jika seorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan warisan.

Sedangkan hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya dapat mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris

⁴¹ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1 h. 36

⁴² *Ibid*, h. 36

⁴³ *Ibid*, h. 37

meninggal dunia. Masalah yang bisa muncul berkaitan dengan hal ini adalah mafqud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan,

Dalam hal keberadaan seorang ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika pewaris meninggal dunia, dalam hal terjadi kasus seperti itu maka pembagian waris dilakukan dengan cara mencari ahli waris tersebut apakah masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak ahli waris jika ternyata dia masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut tersebut tidak datang sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan saham masing-masing.⁴⁴

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri sebagai ahli waris dalam keadaan mengandung ketika pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut lahir.⁴⁵

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memerhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per kasus.⁴⁶

5. Macam-Macam Ahli Waris

⁴⁴ *Ibid*, h. 38

⁴⁵ *Ibid*, h. 38

⁴⁶ *Ibid*, h. 38

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian⁴⁷

a. *Ashobul Furudh*.

Ashobul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, al-Sunnah dan ijma'. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek (ayah dari ayah)
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e)
- 9) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f)
- 10) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- 11) Saudara seayah (paman) yang seayah
- 12) Anak paman yang seibu seayah
- 13) Anak paman yang seayah
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakannya

⁴⁷ Abdul Qodir Zaelani, "Kedudukan Ahli Waris Penganti (*Plastsverfulling*) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya" (Jurnal ADHKI Vol. 2, No.1, Juni 2020), h. 94

⁴⁸ Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h.

Apabila semua ahli waris diatas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut.⁴⁹

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan (ibunya ibu)
- 5) Nenek perempuan (ibunya ayah)
- 6) Saudara perempuan yang seibu seayah
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan hak waris hanya 5 orang yaitu:⁵¹

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu

⁴⁹ *Ibid*, h. 100

⁵⁰ *Ibid*, h. 97

⁵¹ *Ibid*, h. 100

4) Saudara perempuan seayah dan seibu

5) Istri

Andaikata ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut:⁵²

1) Ayah

2) Ibu

3) Anak laki-laki

4) Anak perempuan

5) Suami/istri

b. Ashobah

Kata *ashobah* secara bahasa adalah pembela, penolong pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faraid* adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapat sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashobah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.⁵³

Ahli waris *ashobah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *ashobah* apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-laki. Kelompok *ashobah* ini menerima pembagian harta waris setelah

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4.

⁵³ Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h.

selesai pembagian untuk *ashobul furud*. Termasuk ahli waris *ashobah*, yakni sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki walaupun sampai kebawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 9) Paman kandung
- 10) Paman seapak
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman seapak

Ahli waris *ashobah* dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut.⁵⁵

- 1) *Ashobah bi nafsi* (dengan sendirinya)
- 2) *Ashobah bilghairi* (bersama orang lain)
- 3) *Ashobah ma'al ghairi* (karena orang lain)

Ashobah bi nafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati, tanpa diselingi oleh waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi *ashobah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya anak laki-laki, cucu

⁵⁴ *Ibid*, h. 145

⁵⁵ *Ibid*, h. 144

laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta, setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *ashobul Furud*.⁵⁶

Ashobah bil ghairi adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan *Ashabah* dan secara bersama-sama menerima *Ashabah*).⁵⁷ Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi *Ashabah*, melainkan menjadi *Ashobul furud* biasa. Seperti:⁵⁸

- 1) Anak perempuan beserta anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan beserta cucu laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak

Ashobah ma'al ghairi ialah orang yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang lain yang bukan *Ashobah*. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *Ashobah*, tetapi orang lain tersebut tidak bersekat menerima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak luput menjadi *Ashobah*. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *ashobul furud* biasa, Seperti:⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, h. 144

⁵⁷ *Ibid*, h. 148

⁵⁸ *Ibid*, h. 149

⁵⁹ *Ibid*, h. 151

- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih).
- 2) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih) Perlu diketahui bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi *ashobah ma'al ghairi* apabila tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *ashobah bil ghairi*.

c. *Dzawil Arham.*

Ialah setiap kerabat yang bukan *dzawil furudh* dan bukan pula *ashobah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- 3) Kakek pihak bu (bapak dari ibu)
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu).
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- 7) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak seibu)

⁶⁰ *Ibid*, h. 172

- 8) Bibik (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari bapak.
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- 11) Anak perempuan dari paman
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dan ibu)

6. Sebab-Sebab Waris Islam

Seorang dapat mewarisi harta warisan karena 3 hal, yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan. Ada pun dari beberapa literatur hukum Islam lainnya menyebutkan ada 4 sebab mendapat warisan, yaitu: perkawinan, kekerabatan, perbudakan dan hubungan sesama Islam.⁶¹

a. Hubungan Keturunan (Nasab)

Hubungan nasab yang dimaksud di sini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:⁶²

- 1) *Furu'*, anak keturunan dari si mati;
- 2) *Ushul*, leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mati;
- 3) *Hawasyi*, keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.

b. Hubungan Pernikahan

Berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi

⁶¹ *Ibid*, h. 88

⁶² *Ibid*, h. 89

suami nya yang meninggal. Perkawinan menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan atas dua syarat berikut: Perkawinan sah menurut hukum Islam, yaitu syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, dan antara keduanya telah terjadi akad nikah yang sah. Perkawinan masih utuh, yaitu suami istri masih terkait dalam tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal, termasuk dalam ketentuan ini istri yang masih dalam status masa iddah talak *raj'i*.⁶³

c. Hubungan Perbudakan

Hubungan waris mewarisi karena perbudakan adalah timbul karena proses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka tidak ada hubungan darah. Jadi seorang budak dapat menjadi ahli waris dari tuannya begitu juga sebaliknya. Namun pada zaman sekarang perbincangan tentang budak hanya menjadi wacana terdahulu saja.⁶⁴

7. Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris.

Sebab tidak mendapat waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab. Beberapa sebab yang menghalangi mendapat waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seorang hamba sahaya tidak mendapat waris dari semua keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba sahaya. Status seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang

⁶³ *Ibid*, h. 90

⁶⁴ *Ibid*, h. 91

memandang hamba sahaya itu statusnya sebagai harta milik tuannya, dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga dia tidak memiliki harta.⁶⁵

2. Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan. Para fuqaha aliran Syafi'iyah berpendapat segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.⁶⁶

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris,
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁶⁵ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 115

⁶⁶ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1, h. 40

3. Murtad.

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam. Apabila ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta waris.⁶⁷ Jadi jika pada saat kematian pewaris, ahli waris masih dalam keadaan murtad maka status ahli waris dengan pewaris adalah dalam keadaan berlainan agama, maka berlakulah salah satu sebab tidak mendapatkan warisan.

4. Bagian Ahli Waris

Pada penjelasan kali ini penulis akan menjelaskan tentang bagian warisan berdasarkan pengelompokan ahli warisnya.

a. Ahli Waris Utama

Ahli waris utama dalam hukum waris adalah mereka yang sangat dekat hubungannya dengan pewaris, dan juga ahli waris utama ini tidak akan terhalang oleh ahli waris lainnya, artinya ahli waris utama ini adalah mereka yang pasti akan mendapatkan harta warisan. Mereka ada lah

⁶⁷ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1 h., h. 41

suami/istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Adapun uraian dari para ahli waris ini adalah sebagai berikut:⁶⁸

1) Suami.

Suami bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ jika istri yang meninggal mempunyai anak, dan akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak, baik anak yang diperoleh dengan suami yang dimaksud ataupun anak yang dia (istri) peroleh melalui perkawinan yang sah dengan laki-laki lain.⁶⁹

2) Istri.

Istri bagiannya adalah $\frac{1}{8}$ jika suami yang meninggal mempunyai anak, dan akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak, baik anak yang diperoleh melalui perkawinan dengan istri yang dimaksud ataupun anak yang diperoleh dari perempuan yang lain dari perkawinan yang sah.⁷⁰

3) Ibu.

Sedangkan bagian untuk ibu adalah, dia akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika si pewaris (orang yang meninggal) mempunyai anak, ataupun si pewaris mempunyai beberapa saudara, jika pewaris tidak memiliki anak maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.⁷¹

4) Bapak.

Untuk bagian bapak adalah $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak dan bapak akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dan sisa warisan jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan, dan jika pewaris tidak memiliki

⁶⁸ Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h.

⁶⁹ *Ibid*, h. 112

⁷⁰ *Ibid*, h. 114

⁷¹ *Ibid*, h. 121

anak maka bapak akan mendapatkan harta warisan dengan jalan *ashobah* (sisa warisan).⁷²

5) Anak Perempuan.

Bagian anak perempuan adalah jika dia seorang diri maka dia akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian harta warisan, dan jika dia dua orang atau lebih anak perempuan maka mereka akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian harta warisan dan jika anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki maka dia menjadi *ashobah bilghairi* dengan penghitungan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan.⁷³

6) Anak Laki-laki.

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti dia menerima warisan dengan jalan *ashobah*, jika pewaris hanya memiliki anak laki-laki saja maka dia akan mewarisi dengan jalan *ashobah binafsih*, dan jika pewaris memiliki anak laki-laki dan perempuan maka dia waris dengan jalan *ashobah bilghairi*.⁷⁴

b. Ahli Waris Utama Pengganti

Ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqih menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan, menurut penulis hukum waris Islam mengenal pergantian kedudukan tetapi dalam corak yang khas.

⁷² *Ibid*, h. 118

⁷³ *Ibid*, h. 125

⁷⁴ *Ibid*, h. 127

Mengacu pada pengertian leluhur dan keturunan maka penulis membedakan ahli waris pengganti ke dalam dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek sah kandung, kakek sah (kandung) cucu perempuan dari pancar laki-laki cucu laki-laki dari pancar laki-laki. Sedangkan ahli waris pengganti terdiri dari saudara kandung, seapak dan seibu⁷⁵. Penulis akan menjelaskan tentang ahli waris ini secara rinci di bawah ini:

1) Nenek.

Nenek akan dapat menjadi ahli waris jika tidak ada ibu, jadi nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian untuk nenek adalah $\frac{1}{6}$ seperti bagian ibu.⁷⁶

2) Kakek

Kakek dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, jadi kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak. Pergantian kedudukan bapak oleh kakek ada yang menafsirkan secara mutlak dan ada yang menafsirkannya secara tidak mutlak. Penafsiran tersebut dilakukan berkenaan dengan masalah kakek mewaris bersama dengan saudara sekandung atau saudara seapak.⁷⁷

Abu Bakar ash Shiddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, al-Hasan, Ibnu Sirrin, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek sama dengan bapak, kedudukan saudara sebagai ahli waris baru terbuka tidak saja jika tidak ada bapak, melainkan juga jika tidak ada kakek. Dalam hal kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak

⁷⁵ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1, h. 51

⁷⁶ Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h. 142

⁷⁷ *Ibid*, h. 143

secara mutlak maka bagian warisnya adalah $\frac{1}{6}$ jika pewaris tidak memiliki anak, jika pewaris mempunyai satu anak perempuan maka kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ditambah dengan bagian waris *ashobah* (sis). Dan jika pewaris tidak mempunyai anak maka kakek akan mendapatkan *ashobah* (sis) dari seluruh harta warisan.

Sedangkan untuk pendapat yang kedua yaitu dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Jumhur Ulama memandang kedudukan kekek tidak sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kakek tidak identik dengan bapak. Pergantian kedudukan bapak oleh kakek tidak boleh di analogikan dengan pergantian anak laki-laki oleh cucu karena anak hanya punya cucu, sementara bapak boleh jadi mempunyai saudara kandung atau saudara seapak Kakek dengan dengan saudara sekandung dan saudara seapak mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal kedudukan kakek tidak dipandang sebagai pengganti bapak secara mutlak maka bagian warisnya akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak, dan jika pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan maka bapak akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian ditambah dengan *ashobah* (sis) dari warisan tersebut. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka kakek akan mendapatkan seluruh sis dari harta warisan. Sedangkan jika kakek mewaris bersama dengan saudara maka pembagiannya dengan cara *muqasamah*.

Di dalam *muqasamah*, kakek dipandang sebagai saudara laki laki dan bagiannya ditetapkan sebesar bagian saudara laki-laki, yaitu 2 bagian dan saudara perempuan sebesar 1 bagian dari sis harta warisan.

Jika dengan cara tersebut bagian kakek lebih besar dari $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, maka itulah bagian kakek. Sementara jika dengan cara tersebut bagian kakek lebih kecil dari atau sama dengan $\frac{1}{6}$ harta warisan, maka bagian kakek adalah tetap $\frac{1}{6}$ dan saudara menerima sisa.⁷⁸

3) Cucu Perempuan

Cucu perempuan akan menjadi ahli waris jika pewaris hanya memiliki satu anak perempuan dan ada cucu laki-laki yang menjadi *ashabah* bersama, yaitu cucu laki-laki dan perempuan. Dalam hal kasus seperti ini maka cucu perempuan berkedudukan sebagai anak perempuan. Bagian waris cucu perempuan adalah: jika cucu perempuan itu seorang diri dan pewaris tidak memiliki anak maka cucu perempuan tersebut akan mendapatkan $\frac{1}{2}$. Dan jika cucu perempuan tersebut lebih dari seorang maka cucu perempuan tersebut akan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$, dan akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika cucu perempuan tersebut menjadi ahli waris pelengkap, yaitu cucu perempuan menjadi ahli waris bersama dengan satu anak perempuan, dan apabila cucu perempuan ini bersama dengan cucu laki-laki, maka mereka menjadi *ashabah bilgairi* dengan syarat pewaris tidak memiliki anak

4) Cucu Laki-laki.

Cucu laki-laki dapat menjadi ahli waris jika tidak ada anak laki-laki, jadi cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dapat mewaris bersama dengan paman,

⁷⁸ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1, h. 52

juga dapat menarik bibi dan saudara perempuan menjadi *ashobah bilgairi* sebagaimana halnya anak laki-laki bapaknya. Dalam hal terdapat sejumlah cucu laki-laki bersama atau tidak bersama dengan cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka mereka berserikat menerima bagian bapaknya

c. Ahli Waris Pengganti.

1) Saudara Seibu.

Saudara seibu dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, kakek, anak, dan cucu. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama. Jika saudara seibu hanya satu orang saja maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ sementara jika lebih dari satu orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk semua.

2) Saudara Kandung atau Sebapak.

Saudara kandung atau sebapak sama halnya dengan saudara seibu, dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, kakek, anak dan cucu. Sedangkan anak dan cucu yang dimaksud di sini anak laki-laki atau cucu laki-laki, karena kedudukan anak laki-laki adalah sebagai *ashobah*, yaitu pemilik warisan sisa. Sementara jika anak yang dimaksud adalah anak perempuan maka kedudukan saudara kandung sebapak menjadi *ashobah*.

5. Asas-Asas Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari.

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan

dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁷⁹ Asas *ijabri* dapat dilihat dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris.⁸⁰

Unsur *ijabri* ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan *furudhul muqaddarah* yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seorang yang beragama Islam. Asas *ijbari* ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai seorang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam. Asas ini juga dikuatkan dengan dasar hukum waris pada ayat 13 surah An-Nisa ayat ini menegaskan bahwa ketentuan waris adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba hamba-Nya. Ayat ini juga mengandung makna tentang kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah, yaitu aturan kewarisan Islam, dan barang siapa yang taat niscaya janji Allah adalah berupa balasan keberuntungan, yaitu surga.⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, h. 29

⁸⁰ Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h.

⁸¹ *Ibid*, h. 40.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturun laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁸² Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.⁸³

Jika pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwaliannya. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggung jawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang selama ini berada dibawah perwaliannya.⁸⁴

⁸² Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1, h. 30

⁸³ Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h.

⁸⁴ *Ibid*, h. 44

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang di terima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu atautkah tidak, tetap saja menurut agama laki-laki yang mempunyai ke kewajiban nafkah tersebut.⁸⁵

Bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat sekarang ini ada beberapa keluarga yang mana kaum perempuan menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, ini merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam

⁸⁵ *Ibid*, h. 45

rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam dengan menganut asas 1:1⁸⁶ Jadi meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka bagian waris perempuan tidak akan berubah.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.⁸⁷

6. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris

Sebelum dilakukan pembagian waris ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan si pewaris, adapun kewajiban-kewajiban itu adalah:

a. Penyelenggaraan Jenazah

Penyelenggaraan jenazah⁸⁸ adalah biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Setelah hak pertama ditunaikan sisanya barulah digunakan untuk mengurus mayat. Diantara kebutuhan tersebut adalah biaya memandikan, mengafankan,

⁸⁶ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1, h. 30

⁸⁷ Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h. 48

⁸⁸ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), cet. 1, h. 34

menguburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya di tempat yang terakhir.

Bagi keluarga yang menyelenggarakan jenazah hendaklah jangan berlebihan meskipun semua biaya diambil dari harta si mayat, karena dikhawatirkan kalau ahli waris yang ditinggalkan memerlukan harta peninggalan itu untuk membiayai anak-anak yatim yang tertinggal.

b. Pembayaran Utang

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. “Kalau mayat mempunyai peninggalan utang, utang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi kepada seluruh ahli waris. Utang si mati harus dilunasi dari harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya. Melunasi utang adalah termasuk kewajiban utama, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya dengan seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan surge.

c. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 180.

B. Pengertian Waris Adat

1. Pengertian Waris Adat

Istilah “waris” didalam kelengkapan istilah hukum waris adat, diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata mata hanya akan

menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah bermaksud untuk membedakan dengan istilah hukum waris Barat dan Islam. Dalam hal ini pengertian hukum adat waris, beberapa pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau mengartikan sebagai berikut :

- a) Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi kegenerasi.⁸⁹
- b) Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang Memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁹⁰
- c) Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatif*) kepada keturunannya.⁹¹
- d) Wirjono Prodjodikoro, hukum adat waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

⁸⁹ Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung,: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 66

⁹⁰ Ibid, h. 66

⁹¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 82

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹²

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat wafatnya seorang manusia dimana kemudian manusia yang wafat ia meninggalkan harta kekayaan.⁹³

Tekanan perhatian warisan dari Wirjono diartikan sebagai cara diartikan penyelesaian; penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat bukan bendanya cara dilaksanakan sebelum ia wafat.

Sesungguhnya mengartikan warisan setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris meninggal dunia sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris.⁹⁴

Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris Kepada pewaris sebelum pewaris wafat (Jawa, lintiran) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan Pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

⁹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), h. 13

⁹³ Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung,: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 67

⁹⁴ Ibid, h. 67

Hukum waris adat, memang mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, berbeda dari hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata Barat. Latar belakang yang menyebabkan perbedaan itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan Kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yaitu:⁹⁵

- a) Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan Harta kekayaan
- b) Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c) Harta-warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para Ahli waris itu

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:⁹⁶

- 1) Unsur Pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana peninggal warisan itu berada.
- 2) Unsur Kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.

⁹⁵ *Ibid*, h. 68

⁹⁶ *Ibid*, h. 68

Unsur Ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

2. Sifat Hukum Waris Adat.

Jika hukum waris Adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris Perdata Barat, maka nampak perbedaan perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Menurut hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan pada warisnya. Harta warisan adat tidak dapat dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi bagikan penguasaan dan pemilikanannya kepada para waris, dan ada yang dapat dibagi.

Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati, bahkan dapat digadaikan jika sangat mendesak, berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Sedangkan harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain, harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar

tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.⁹⁷

Hukum waris adat tidak mengenal asas “*Legitieme portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUH Perdata, atau didalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 11 dan 12.

3. Sistem Kewarisan Adat

Didalam hukum waris adat, secara teoritis dapat di bedakan menjadi tiga macam sistem kewarisan, yaitu:⁹⁸

- 1) Sistem Kewarisan Individual adalah sistem kewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental. Biasanya terdapat pada masyarakat adat Jawa atau juga masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat “*Manjae*” (mentas, mencar dalam bahasa Jawa), atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam; seperti

⁹⁷ *Ibid*, h. 69

⁹⁸ *Ibid*, h. 71

dikalangan masyarakat adat Lampung Pesisir yang mayoritas berdomosili di bagian pantai-pantai daerah Lampung.⁹⁹

- 2) Sistem Kewarisan Kolektif adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem ini terdapat di daerah Minangkabau, terkadang juga di tanah Batak dan di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif ini berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau penguasaan mamak kepala waris, dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai “ganggam-bauntuik”. Yang serupa dengan tanah pusaka di Minang ini adalah “tanah Dati” di daerah Ambon. Tanah Dati tidak dibagi-bagikan kepada waris, melainkan hanya disediakan bagi para waris untuk dipergunakan terutama para anggota keluarga pewaris dibawah pimpinan atau pengurusan kepala Dati.¹⁰⁰ Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang atau tanah kalakeran yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi bagi, tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak Pakai anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Yang mengatur dan mengawasi tanah kalakeran adalah tua-tua kerabat yang disebut “Tua untaranak”.¹⁰¹

Kebaikan dari sistem kewarisan kolektif adalah masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan keluarga

⁹⁹ *Ibid*, h. 72

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 72

¹⁰¹ *Ibid*, h. 72

besar dari sekarang dan masa yang akan datang. Tolong-menolong antara satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat dengan penuh tanggung jawab masih dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Kelemahan dari sistem kewarisan kolektif menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu karena tidak selamanya satu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.

- 3) Sistem Kewarisan Mayorat adalah suatu sistem dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atau kepala keluarga menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun temurun. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua dalam hal mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan

Keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Kedudukan anak tertua terhadap harta peninggalan hanya sebagai penguasa, sebagai pemegang amanat orang tua yang di batasi oleh musyawarah keluarga berdasarkan azas tolong menolong oleh bersama untuk bersama, dengan demikian anak tertua bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan. Sistem Mayorat ini terbagi atas dua macam:

- a) Mayorat laki-laki, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung yang beradat Pepadun.
- b) Mayorat Perempuan, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, menurut Prof. Hazairin “Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayorat. itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan

dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara”.¹⁰²

4. Pembagian Waris Adat Semende

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.¹⁰³

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.¹⁰⁴

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas sistim kekeluargaan matrilineal adat Semendo. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia terbitan LP3ES menyebutkan, suku Semendo atau Semende berasal dari kata se yang berarti satu dan mende yang berarti induk atau ibu. Masyarakat suku ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat yang bermukim di

¹⁰² *Ibid*, h. 74

¹⁰³ Muhammad Yasir Fauzi, *Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, h. 91

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 91

daerah Kabupaten Muara Enim, dan Semende Lembak yang bermukim di Kabupaten Ogan Komering Ulu.¹⁰⁵

Dengan tradisi *Tunggu Tubang* yang mereka anut, dalam ensiklopedi tersebut masyarakat Semendo dikategorikan sebagai salah satu penganut prinsip kekerabatan matrilineal, sebagaimana masyarakat Minangkabau. “Sesuai dengan tradisi *Tunggu Tubang*, anak perempuan paling tua menjadi pemegang hak warisan keluarga. warisan berupa rumah dan sawah itu tidak boleh dijual.¹⁰⁶

Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan.

Anak perempuan tertua mengacu ke anak perempuan pertama yang dilahirkan dalam keluarga. Artinya, bisa jadi anak perempuan tertua itu dalam urutan keluarga memiliki kakak laki-laki. Tradisi yang telah berjalan selama ratusan tahun itu, bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga berupa rumah dan sawah tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (jurai) dari generasi ke generasi. Tradisi ini agaknya didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang melahirkan kehidupan dan berasal dari rahim, maka perempuan pula yang dipercaya untuk memeliharanya.

Menjadi seorang pewaris *Tunggu Tubang* tidak membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 91

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 91

sehari-hari, selain harus mengurus rumah tangganya sendiri, perempuan pewaris *tunggu tubang* dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan kebun (kebun kopi).

Kewajibannya sebagai penunggu rumah dan pengelola sawah warisan mengharuskan perempuan pewaris *Tunggu Tubang* “bertahan” di kampung halaman mereka. Namun saat ini, perkembangan zaman memungkinkan bagi perempuan Semendo yang menjadi pewaris *Tunggu Tubang* untuk keluar dari rumah dan tidak melepas statusnya sebagai *Tunggu Tubang*.

Seandainya muncul permasalahan dalam keluarga, perempuan pewaris *tunggu tubang* harus mendengarkan pendapat saudara laki-lakinya. Anak laki-laki, dalam adat berkedudukan sebagai ahli meraje atau pihak yang dimintai pendapatnya atas suatu perkara. Biasanya keputusan atas masalah-masalah besar dilakukan oleh ahli meraje.¹⁰⁷

Pembagian warisan pada Suku Semende berlaku dua jenis kewarisan, yakni kewarisan dengan sistem *Tunggu Tubang* dan kewarisan dengan memakai hukum Islam, dan yang dipakai saat ini adalah kewarisan dengan sistem *Tunggu Tubang*. Dalam kewarisan adat *Tunggu Tubang*, harta diberikan atau diwariskan hanya kepada anak *Tunggu Tubang* seorang dengan ketentuan harta itu tidak bisa diperjual belikan. Anak *Tunggu Tubang* hanya berhak mengelola dan mengambil manfaat dari harta tersebut.

Kewarisan adat *Tunggu Tubang* terjadi ketika orang tua masih hidup ataupun telah wafat. Harta ini hanya diwarisi oleh seorang anak *Tunggu*

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 91

Tubang dengan mengikuti dibalik harta itu kewajiban untuk mengurus keluarga dan kerabat *Tunggu Tubang*. Jadi secara tidak langsung anak-anak yang lain telah mendapatkan haknya atas harta itu. Sistem ini diberlakukan karena untuk menjaga silaturahmi dan menjaga harta orang tua. Sedangkan harta selain harta *Tunggu Tubang* dibagi rata dengan kebijaksanaan orang tua.

Sedangkan sistem kewarisan Islam dipakai jika harta *Tunggu Tubang* ingin dibagi secara Islam, namun sistem ini baru berlaku jika semua anak dan *Meraje* setuju untuk memberlakukan sistem ini. Kalau sistem ini berlaku, maka tidak ada yang berbeda atau tambahan apapun pada Suku Semende Darat Ulu.

Kewarisan Islam ini tidak berlaku dengan maksud dan tujuan agar terjaganya kemaslahatan harta warisan *Tunggu Tubang* untuk pewaris yang akan datang. Tradisi ini juga berlaku turun temurun sejak nenek moyang suku Semende.

Tunggu Tubang adalah anak perempuan tertua dalam adat semendo yang memegang kekuasaan atas semua harta didalam keluarganya dibawah pengawasan pria sebagai *Meraje* sebagai pengawas supaya harta seluruhnya tidak rusak dan hilang, dengan syarat *Tunggu Tubang* harus tetap berada dirumah dan tidak pergi paska atau setelah ia melakukan pernikahan karena dimaksudkan bahwa anak tertua dalam adat semendo

harus menjaga kedua orang tuanya setelah menikah dan menjaga tradisi turun-temurun didalam rumah tersebut.¹⁰⁸

Sistem pada masyarakat adat semende tebilang cukup unik. Dalam suku ini terdapat istilah *Tunggu Tubang*, yang merupakan status yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana status tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua menginjak menikah.

Tunggu Tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang diterapkan pada masyarakat suku semendo, menarik garis keturunan dari ibu yang sering disebut matrilineal. Dimana yang berhak menerima dan menjaga harta warisan adalah anak perempuan yang terlahir pertama yang dalam suku ini disebut tunggu tubing.

Pembagian harta warisan menurut adat semendo lebih mengutamakan perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka meninggal dunia otomatis harta dapat diberikan kepada anak perempuan tertua. Walaupun semua harta jatuh kepada anak perempuan tertua bukan berarti harta tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan.

5. Syarat-Syarat Waris adat

Kewarisan yang sudah menjadi turun temurun dalam adat semendo merupakan kewarisan yang sifat susunan kekeluargaan matrilineal dimana tidak ada pembayaran jujur, setelah kawin suami masuk dalam keluarga istrinya sebagai orang semendo karena anak perempuan tertua dalam adat

¹⁰⁸ <http://putrasemende.blogspot.co.id/2013/01>

semendo merupakan *Tunggu Tubang* yang telah difungsikan sebagai penjaga harta atau pusaka keluarganya.¹⁰⁹

Dalam pembagian harta warisan dalam pembicaraan Ulama Semendo (pada zaman Haji Abdu'rasyid) menjadi khotib bersama tuan guru Ahmad Klantan Malaysia. Dalam putusan nya yaitu: “harta pusaka tinggi turun temurun dan harta pusaka rendah tidak boleh dibagi. hanya dijaga, dipelihara oleh sekalian ahli waris supaya jangan rusak, ataupun hilang” disini anak *Tunggu Tubang* yang berhak menunggu, mengingat isinya ialah:¹¹⁰

- a) Karena sayang kepada saudara perempuan, dan mengangkat derajat ibu.
- b) Menegakkan persatuan keluarga, pikiran dan harta
- c) Menjaga kehidupan
- d) Membangun sifat gotong royong
- e) Menggerakan sifat sosial.

Adapun Undang-Undang (peraturan-peraturan) *Tunggu Tubang* yang wajib dilakukannya setelah menikah didalam masyarakat semende yaitu:

- a) Menunggu harta pusaka
- b) *Tunggu Tubang* wajib memelihara kedua orangtuanya sampai mati dengan secara baik dan sopan.
- c) Memelihara Lautan, adik perempuan sampai berumah tangga (kawin).
- d) Mematuhi perintah teku Jurai dalam segala urusan yang baik

¹⁰⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, (PT Gunung Agung: Jakarta, 1995), h. 130.

¹¹⁰ Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih, “*Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semend*”, (Jurnal Vol. 7, No. 2, 2017, Universitas Pendidikan Indonesia)

e) Memelihara tamu dari dekat keluarga keluarga jauh baik lama atau Sebentar

Dengan Undang-Undang (peraturan-peraturan), *Tunggu Tubang* harus mematuhi dan memelihara pusaka berupa rumah, sebidang sawah, kebun, dan sebuah kolam (tambak ikan).

Pusaka yang telah diberikan kepada anak perempuan tertua yakni *Tunggu Tubang* harus dijaga baik setelah bersuami dan lelaki yang menjadi suami tersebut tidak merasa hina sebaliknya pula dimana *Tunggu Tubang* datang pada keluarga laki tetap seimbang, sering terjadinya dimana dala pernikahan *Tunggu Tubang* cerai (mati), anak-anaknya tetap tinggal pada ibunya serta barang barang yang ayahnya sudah diisikan tidak boleh diambil kembali karna hidup anak-anak terjamin oleh ibunya (sawah dan rumah ada).¹¹¹

Ilmu pengetahuan yang dibawa oleh puyang-puyang menjadi bahan pokok acara pada waktu sidang puyang Awak. Bahan materi tersebut diteliti, dibaca dan diteliti bersama. Memutuskan “anak cucu puyang Awak mayoritas 90% menganut agama Islam dimana harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah tidak boleh dibagi”.

Akibat dalam tidak mengetahui adat, sekarang sudah sering terjadi pelanggaran yakni:

- 1) Anak belay (*Tunggu Tubang*) meninggalkan harta pusaka
- 2) Mereka mencari dan berusaha ketempat lain
- 3) Harta pusaka dianggap bernilai rendah

¹¹¹ <http://putrasemende.blogspot.co.id/2013/01>

4) Adat istiadat dianggap remeh

Bagi para Meraje (pemimpin) yang kurang memahami adat acap kali mengambil keuntungan dari harta pusaka *Tunggu Tubang*. Dimana nenek moyang telah menggariskan bahwa anak belay (*Tunggu Tubang*) adalah yang berhak mengelola serta mengambil faedah, tetapi tidak berhak menjual.¹¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak perempuan tertua yang memperoleh harta dalam adat semendo kewarisannya dapat hilang apabila *Tunggu Tubang* tersebut tidak mematuhi apa yang sudah menjadi adat istiadat sebagaimana yang sudah diajarkan puyak awak (nenek moyang) terdahulu, dengan melanggar apa yang sudah menjadi tradisi turun temurun.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan kajian pustaka terhadap beberapa karya ilmiah yang dibuat sebelum penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah yang telah peneliti review dan mendekati penelitian yang hendak peneliti lakukan, yaitu: Skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat)” yang ditulis oleh Mariyah. Dalam skripsi ini, Mariyah meneliti tentang pengetahuan dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kapuk terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini juga membahas tentang sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum waris Islam. Sedangkan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah berkenaan dengan sebuah sistem kewarisan yang

¹¹² <http://putrasemende.blogspot.co.id/2013/01>

berlaku di masyarakat Semendo Darat Ulu. Bukan membahas kepada kesadaran atau sikap perilaku masyarakat. Hal lain yang membedakan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah peneliti juga membandingkan aspek hukum dari sistem kewarisan tersebut dipandang dari hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam.

Terakhir yakni jurnal yang berjudul “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende” yang ditulis oleh Azelia Velinda dan kawan-kawan. Dalam jurnal ini, Azelia dan kawan-kawan hanya membahas tentang apa itu Tunggu Tubang, harta Tunggu Tubang, hak dan kewajiban anak Tunggu Tubang. Jurnal ini hanya membahas sebagian kecil dari skripsi yang hendak penulis susun. Sedangkan bahasan penulis lebih luas dan mendalam mengenai kewarisan adat Tunggu Tubang. Skripsi yang hendak penulis susun ini berbeda secara signifikan dalam aspek meninjau adat Tunggu Tubang dengan hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam

Melihat skripsi yang telah penulis uraikan di atas, penulis berpendapat bahwa skripsi yang hendak penulis teliti adalah berbeda dengan penelitian yang telah lalu. Skripsi pertama membahas tentang kesadaran hukum terhadap waris. Jurnal Azelia dan kawan-kawan fokus kepada bagaimana Tunggu Tubang dalam proses pembagian waris. Sedangkan penulis fokus kepada adat Tunggu Tubang Semendo dan meninjaunya dari hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa skripsi yang hendak penulis susun ini murni dan masih baru.

DAPTAR PUSTAKA

- Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih, “*Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semend*”, (*Jurnal VOL. 7, NO. 2, 2017, Universitas Pendidikan Indonesia*)
- Abdul Ghofur anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Aulia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)
- Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005)
- Departemen Agama R.1. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, 2008). Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris, Pustaka Setia*, 2009)
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996)
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2009)
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Muhammad Yasir Fauzi, *Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Nugraheni, Destri Budi & Haniah Ilhami. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997)

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, (PT Gunung Agung: Jakarta, 1995)

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. 2, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Praditya Paramita, 2010)

Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020)

Hidayah,Z. *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, 1997.

<http://putrasemende.blogspot.co.id/2013/01>

Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

Wirjono Prodjodikoro, *hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983)

Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung,: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

